

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya imperium Turki Utsmani pada 1924 menyebabkan terjadinya perubahan sistem politik yang ekstrem di dalam tubuh Turki. Dibawah kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk sistem politik Turki yang tadinya berlandaskan pada nilai-nilai dan hukum Islam dihapus dan diganti dengan sistem politik sekuler yang berkiblat pada bangsa-bangsa barat. Perubahan ekstrem yang dilakukan oleh Mustafa Kemal ini adalah bagian dari upayanya untuk mendapatkan ruang bagi Turki di peradaban bangsa Barat.¹

Geliat modernisasi yang terjadi pasca runtuhnya Turki Utsmani kemudian menjadikan Turki sebagai salah satu mitra bagi Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa Barat khususnya di kawasan Timur Tengah. Kedekatan Turki dengan negara-negara barat ini kemudian menjadi salah satu jembatan penghubung bagi kerjasama yang terjalin antara Turki dan Israel pada masa-masa yang akan datang.

Turki dan Israel sendiri adalah dua negara non arab yang terletak di wilayah Timur Tengah. Hubungan kedua negara ini telah tberlangsung sejak sekian lama dan telah menjalin berbagai macam kerjasama. Israel berdiri pada tahun 1948, dan setahun setelah diproklamirkannya itu Turki menjadi negara ketiga yang mengakui kedaulatan Israel sebagai sebuah negara setelah Amerika Serikat dan USSR pada saat itu, dan menjadi negara dengan mayoritas muslim yang melakukannya. Pada tahun 1950, setahun setelah mengakui kedaulatan Israel,

¹ Maryam, S. (2003). *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: LESFI YOGYAKARTA.

Turki mengirimkan misi diplomatik pertamanya dengan Seyfullah Esin menjadi wakil Turki yang pertama untuk Israel.²

Meski sempat mengalami beberapa permasalahan pada dekade 1950an hubungan Turki dan Israel kembali membaik, hal ini dilihat dari berlangsungnya negosiasi kerjasama antara Perdana Menteri Turki Adnan Manderes dan Perdana Menteri Israel David Ben Gurion yang membahas tentang kerjasama diplomatik, kerjasama militer dan juga ekonomi. Termasuk pada pertemuan tersebut membahas tentang kesepakatan untuk meningkatkan volume perdagangan, kerjasama intelijen, dan rencana kesiapsiagaan.

Pada periode 1950-1980an hubungan kerjasama Turki dan Israel kerap mengalami fase naik dan turun seiring dengan dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Juga kerjasama yang terjalin di antara keduanya berlangsung dengan relatif lebih tertutup. Namun periode 1990an adalah periode emas bagi kerjasama Turki dan Israel, hubungan keduanya tidak hanya menjadi terbuka namun juga semakin kuat di setiap bidangnya. Pada 1996 Turki dan Israel menandatangani kerjasama strategis dan juga perjanjian perdagangan. Kerjasama ini memberikan kesempatan bagi Turki untuk mendapatkan pembaharuan bagi sistem persenjataannya dari Israel, dan sebaliknya Israel mendapatkan pasar yang menguntungkan bagi industri pertahanannya. Selain pembaharuan pada sistem alutsista pertahanan dan keamanan, kerjasama Turki dan Israel juga meliputi transfer teknologi pada bidang militer, kerjasama intelijen, latihan gabungan bagi militer kedua negara, dan Turki memperbolehkan Israel menggunakan pangkalan udaranya untuk latihan manuver angkatan udara Israel.³

² Anadolu Agency. (2016, June 27). *Turkey-Israeli Relations: A timeline*. Retrieved from aa.com.tr: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkey-israel-relations-a-timeline/598666>

³ Efron, S. (2018). *The Future of Israeli-Turkish Relations*. Santa Monica: RAND Corporation.

Tidak hanya pada bidang pertahanan dan keamanan, pada periode 1996-1998 Turki dan Israel juga melaksanakan kerjasama ekonomi yang masif, di dalamnya termasuk perdagangan bebas, industri pariwisata, investasi pada bidang teknologi dan juga kerjasama pada bidang saintifik. Kerjasama ekonomi ini terbukti meningkatkan nilai perdagangan dan sangat menguntungkan bagi kedua negara.

Namun, memasuki era 2000an hubungan kerjasama Turki dan Israel mengalami tren yang cenderung menurun. Menangnya AKP yang dipimpin oleh Erdogan pada pemilu Turki menjadi salah satu penyebab dari hal tersebut. Meskipun masih menjalin kerjasama baik pada bidang ekonomi dan juga militer, Turki di bawah kepemimpinan AKP mulai perlahan mengubah arah kebijakan luar negeri yang tadinya fokus pada integrasi dengan bangsa barat menjadi Turki yang lebih dekat dengan dunia Islam dan juga negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah.⁴

Eskalasi politik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah seperti pembunuhan pemimpin Hamas Syekh Ahmed Yassin, blokade jalur Gaza dan juga operasi *Cast Lead* yang dilakukan oleh Israel pada Palestina turut andil menjadi faktor yang cukup dominan bagi merenggangnya hubungan bilateral antara Turki dan Israel. Kejadian penyerangan terhadap kapal Mavi Marmara yang membawa rombongan kemanusiaan dalam misi *Gaza Flotilla* tahun 2010 menewaskan 8 warga negara Turki dan 1 orang berkebangsaan Turki-Amerika adalah sebuah akumulasi dari tindakan Israel yang membuat Turki cukup berang. Sebagai buntut dari penyerangan ini Turki mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel tersebut dan bersikeras kepada Israel untuk menyampaikan permohonan maaf dan bertanggungjawab atas tindakannya tersebut.

⁴ Gullu, I. (2016). Describing Turkey-Israel Relationships With Its Trade Dimension. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 103-114.

Tidak cukup sampai disana, Turki dalam hal ini memberikan respon yang cukup serius dengan cara menanggukkan segala bentuk kerjasama yang dijalinnya dengan Israel. Sebagaimana yang kita ketahui antara Turki dan Israel memiliki hubungan diplomatik yang cukup intensif. Kerjasama kedua negara di bidang ekonomi dan keamanan tidak perlu dipertanyakan lagi. Akan tetapi pasca terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh Militer Israel terhadap kapal yang membawa para aktivis kemanusiaan, menjadi babak baru bagi sejarah hubungan diplomatik Turki dan Israel yang sudah berlangsung sejak lama.⁵

Hal ini menjadi menarik untuk untuk dianalisa. Turki yang tadinya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Israel secara seketika memutuskan hubungan diplomatiknya begitu saja. Maka dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk menganalisa apa sebab dan alasan kuat Turki sehingga mengambil langkah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel, pasca penyerangan kapal Mavi Marmara beberapa waktu sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Dari fenomena yang sudah dijelaskan penulis pada latar belakang di atas maka yang menjadi pertanyaan-nya adalah *“Mengapa Turki Memutuskan Hubungan Diplomatik Dengan Israel Pada Tahun 2010 ?”*

C. Landasan Teoritik

Dalam sebuah karya akademik dibutuhkan sebuah landasan teoritik untuk menjelaskan fenomena yang dijadikan

⁵ Sherwood, H. (2011, September 06). *Turkey Suspends Military Ties with Israel*. Retrieved from theguardian.com: <https://www.theguardian.com/world/2011/sep/06/turkey-suspends-israel-military-ties>

sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan salah satu model dari teori Pengambilan Keputusan Milik Graham T. Allison. Dalam tulisannya konseptual *Models and the Cuban Missile Crisis* Allison menjelaskan bahwa ada 3 model dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri yaitu *Rational Model*, *Organizational Model*, dan *Bireaucratic Model*.⁶ Namun, dalam menganalisa permasalahan yang penulis munculkan ini, penulis hanya akan menggunakan *Rational Model* sebagai alat untuk melakukan analisa.

Model Rational Actor

Model Rational Actor adalah satu dari tiga model pembuatan keputusan politik luar negeri yang diajukan oleh Graham T. Allison. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolitik, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi.⁷

Dalam model ini negara merupakan aktor tunggal dalam pembuatan kebijakan, menentukan tujuan dan pilihan. Pembuatan kebijakan melalui rasional model dibuat sebagai respon dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh negara. Negara akan mengambil tindakan atas ancaman dan kesempatan yang terjadi di dalam sistem internasional. Komponen-komponen yang terdapat dalam pengambilan keputusan melalui Model Rasional yakni meliputi tujuan, pilihan, dan konsekuensi. Dalam *Rational Model*, faktor ekonomi politik dan isu kebijakan luar negeri mempengaruhi

⁶ Allison, G. T. (1969). Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. *The American Political Science Review* , 689-718.

⁷ Mas' oed, Mochtar.1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi, Edisi Pertama. LP3S, Jakarta.

terjadinya proses pengambilan kebijakan suatu negara.⁸ Adapun suatu keputusan dapat dianggap rasional adalah harus memiliki 3 kriteria, sbb.

Tindakan yang diambil oleh aktor merupakan tindakan yang didasarkan pada tujuan, bukan berdasarkan kebiasaan ataupun harapan. Pembuat kebijakan harus dapat mengidentifikasi tujuan dan memiliki keinginan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pembuat kebijakan harus dapat menunjukkan pilihan yang konsisten sebagai bukti dari kemampuannya untuk memilih dari pilihan-pilihan yang ada. Pemilihan tersebut didasarkan pada perhitungan keuntungan yang pastinya akan lebih besar.

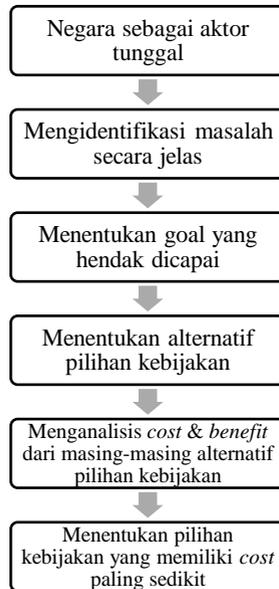
Kemampuan untuk memaksimalkan pilihan yang dipilih sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan keuntungan yang mungkin akan didapat.

Kebijakan yang dihasilkan melalui *Rational Model* ini direfleksikan sebagai sebuah *National Choice* suatu negara. Analisis dengan menggunakan *Rational Choice* bertujuan untuk melihat hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan pilihan kebijakan yang diambil. Bila pilihan kebijakan yang diambil membuat negara tersebut mencapai tujuan nasionalnya, maka kebijakan tersebut dapat dinilai sebagai pilihan kebijakan yang rasional.

Suatu negara menggunakan mekanisme *Rational Model* ketika negara tersebut tidak bisa mengetahui dan memperkirakan situasi dan kondisi domestik di negara lain sehingga pilihan yang mungkin dilakukan yakni dengan mengambil kebijakan yang paling rasional. Dengan mengetahui

⁸ Tonra, B., & Christiansen, T. (Eds.). (2018). " Bibliography". In *Rethinking European Union Foreign Policy*. Manchester, England: Manchester University Press. Retrieved Apr 23, 2021, from <https://www.manchesteropenhive.com/view/9781526137647/9781526137647.00015.xml>.

tujuan nasional suatu negara, maka negara lain diharapkan dapat memperkirakan kebijakan yang mungkin diambil oleh negara lain. Selain itu, pilihan kebijakan juga didasarkan pada perhitungan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Berikut bagan di bawah ini menjelaskan tentang proses pembuatan keputusan melalui pendekatan *Rational Model*:



Bagan 1: *The Rational Model Of Decision Making*

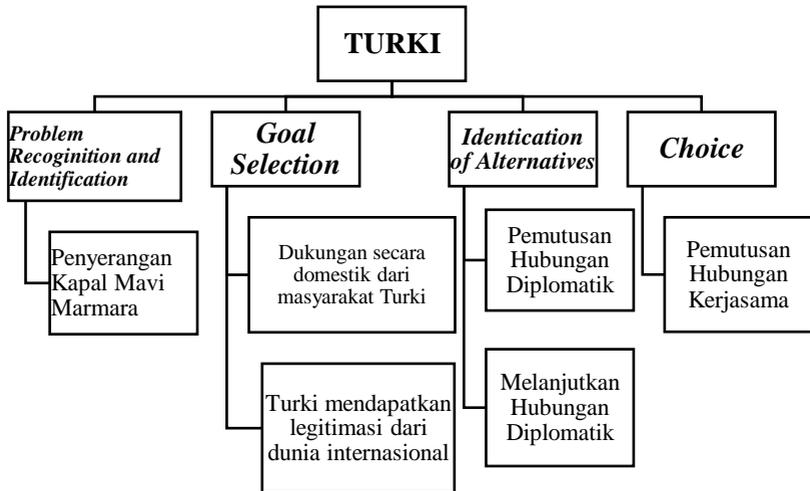
Sumber: Karen A. Mingst. 2003. *Essentials of International Relations*. Second Edition. New York: W.W. Norton & Company, Inc. Hlm 120.

Untuk mempermudah proses analisa kasus, penulis akan menggunakan *Rational Model* sebagai alat untuk menganalisa, namun penulis dalam hal ini akan menggunakan model milik Charles William Kegley dan Shannon Lindsey Blanton untuk dapat menjelaskan proses dalam pengambilan kebijakan. Konsep ini merupakan penerjemahan yang lebih sederhana dari *Rational Model* milik Graham T. Allison yang

lebih mudah dipahami dan lebih terstruktur. Model yang ditawarkan Kegley ini merupakan sebuah strategi berupa tahapan dalam pembuatan suatu kebijakan. Dengan konsep rangkaian tahapan ini, seorang yang akan mengambil keputusan dapat memasukkan indikator dan variabel sebagai bahan pertimbangan untuk mencari pilihan terbaik dalam sebuah proses pengambilan kebijakan. Kegley mendefinisikan *Rational Model* sebagai prosedur pengambilan keputusan yang dipandu oleh pendefinisian yang hati-hati dari sebuah situasi, dengan menimbang tujuan, mempertimbangkan semua alternatif, dan pemilihan opsi yang paling menguntungkan dan memungkinkan untuk mencapai tujuan tertinggi.⁹

Meskipun pengambilan kebijakan berdasarkan unsur rasional, Kegley tetap memberikan penjelasan dalam tahapan pengambilan kebijakan tersebut. Dalam pengambilan keputusan, aktor harus memenuhi langkah-langkah intelektual, diantaranya *Problem recognition and definition, Goal Selection, Identification of Alternative, Choice*. Dalam kasus ini, Turki telah melakukan tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Kegley yang berikutnya dapat dijelaskan melalui bagan berikut:

⁹ Charles W. Kegley, Jr., et.al. *World Politics, Trend and Transformation* (USA: University of Memphis, 2011) hal. 196



Bagan 2: *The Rational Model Of Decision Making William Kegley and Shanon Blanton*

- ***Problem Recognition and Definiton***

Turki mendefinisikan penyerangan kapal Mavi marmara sebagai sebuah permasalahan besar yang harus segera diselesaikan. Karena penyerangan tersebut menyangkut kedaulatan dan keamanan warga negaranya. Setelah terjadinya insiden penyerangan tersebut, Turki melayangkan protes dan mengancam Israel untuk memutus kerjasama diantara keduanya jika pemerintah Israel tidak meminta maaf secara resmi kepada Turki atas insiden tersebut. Namun hingga waktu yang telah ditentukan, Pemerintah Israel tidak kunjung mengeluarkan Statement permintaan maafnya atas Insiden penyerangan yang menimpa kapal mavi Marmara tersebut.

- ***Goal Selection***

Selain karena faktor kedaulatan dan keamanan warga negaranya, faktor lain yang menyebabkan Turki berani memutuskan kerjasamanya dengan Israel adalah untuk menunjukkan komitmen pada prinsip-prinsip luar negeri yang

dianutnya. Dimana hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ahmed Dovutoglu dalam tulisannya ketika menjabat menteri luar negeri.

“As its region experiences democratization Turkey will continue its quest to maintain a balance between promoting democratic values and defending national interest”¹⁰

Dari prinsip tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Turki akan tetap memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, namun disisi lain Turki tidak akan menomorduakan kepentingan nasionalnya. Turki dengan strategi *Zero Problem With Neighbors* nya akan tetap menjalin kerjasama dengan negara manapun, selama tidak mengusik kepentingan nasionalnya.

- ***Identification of Alternatives***

Turki yang sudah berkomitmen dalam menanamkan nilai-nilai kebebasan dalam politik internasionalnya kecewa dengan peristiwa penyerangan kapal Mavi Marmara yang menewaskan 8 orang warga negaranya. Oleh sebab itu apabila harus memutuskan kerjasama dengan Israel maka akan ada dampak yang cukup signifikan bagi Turki, khususnya pada bidang ekonomi dan pertahanan karena fokus terbesar dari kerjasama keduanya terletak pada sektor itu. Maka untuk mencukupi kebutuhannya dalam sektor pertahanan Turki dapat membuka alternatif kerjasama dengan negara lain.

- ***Choice***

Adapun dengan alternatif yang ada, maka memutuskan hubungan kerjasama dengan Israel yang Turki harus lakukan demi mencapai *National Interest* nya dan mempertahankan martabatnya sebagai sebuah negara.

¹⁰ Davutoğlu, A. (2014). Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring. *Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development*, (1), 96-105. Retrieved April 23, 2021, from <https://www.jstor.org/stable/48573436>

Dari bagan dan penjelasan di atas kita dapat memetakan bagaimana proses yang telah ditempuh oleh Turki sehingga kemudian melahirkan keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel pasca terjadinya penyerangan terhadap kapal Mavi Marmara.

D. Hipotesa

Berdasarkan pada paparan teoritik di atas maka dalam hal ini penulis memiliki dua hipotesis yang akan menjadi jawaban sementara dari rumusan masalah yang penulis munculkan. Turki mengambil kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel pasca terjadinya serangan terhadap kapal Mavi Marmara pada tahun 2010 adalah karena

1. Turki Mengambil Kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel pasca serangan kapal Mavi Marmara pada tahun 2010 karena Turki berkepentingan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatannya sebagai sebuah negara yaitu bertanggung jawab atas keamanan dan menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya sehingga Turki akan mendapatkan dukungan penuh dari rakyatnya.
2. Turki mengambil kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pasca terjadinya serangan terhadap kapal Mavi Marmara adalah sebagai wujud komitmen Turki dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam menjalankan kebijakan luar negeri dan sebagai upaya untuk mendapatkan legitimasi dari dunia Internasional khususnya negara-negara Timur Tengah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan sasaran daripada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Membahas secara ilmiah tentang kebijakan luar negeri yang diambil oleh Turki dalam menyikapi kasus kapal Kemanusiaan Mavi Marmara pada tahun 2010.
2. Mengetahui alasan dari langkah-langkah diplomasi yang ditempuh oleh Turki dalam menghadapi Israel, dimana ini menjadi spesial untuk diketahui karena seperti yang kita ketahui kalau Israel adalah salah satu negara yang memiliki *back-up Power* yang cukup kuat.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian akan dilaksanakan dengan melakukan studi pustaka dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data. Adapun data yang akan digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur-literatur yang terdapat di berbagai sumber valid meliputi buku, surat kabar, artikel ilmiah, situs internet serta sumber-sumber yang kiranya valid dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Teknik pengumpulan data akan dilakukan secara sistematis diawali dengan pengumpulan data sebanyak mungkin, kemudian setelah dikumpulkan, data akan diseleksi dan dikelompokkan ke dalam beberapa bab pembahasan yang akan disesuaikan dengan sistematika penulisan.

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis tidak melebar, dan kehilangan esensi. Maka penulis dalam hal ini membatasi jangkauan penelitian mulai dari tahun 2010 yaitu awal mula fenomena ini terjadi, sampai dengan tahun 2016, yaitu tahun memulihkannya hubungan bilateral kedua negara yang menjadi objek dari penelitian penulis.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis juga menyertakan sistematika penulisan. Karena penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat mutlak dan kaidah yang tidak boleh absen daripada penulisan karya ilmiah. Karena baik dan buruknya sebuah hasil penelitian akan ditentukan oleh cara menyajikan hasil penelitian tersebut. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada **Bab-I**, Penulis akan mengisi dengan Bab pendahuluan yang mencakup: Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Landasan Teoritik, Hipotesa, Tujuan penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Adapun pada **Bab-II**, Penulis akan menceritakan tentang sejarah dan perkembangan kerjasama bilateral antara Turki dan Israel dari masa ke masa.

Kemudian pada **Bab-III**, Penulis akan membahas tentang latar belakang berlangsungnya misi *Gaza Flotilla* yang menjadi sumber dari konflik yang terjadi antara Turki dan Israel.

Pada **Bab-IV**, Penulis akan membahas tentang penyerangan kapal kemanusiaan Mavi Marmara oleh Israel hingga putusannya hubungan kerjasama antara Turki dan Israel.

Dan pada **Bab-V** akan ditutup dengan kesimpulan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tugas akhir ini.